

KRITERIA KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI

ADITYAWARMAN

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

e-mail: adityawarman68@gmail.com

ABSTRAK

Persoalan kepemimpinan hangat di bicarakan di tengah masyarakat Indonesia dimana masyarakat dihadapkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 20019. Kriteria kepemimpinan dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat Indonesia pada permulaan tahun 2004, dimana masyarakat Indonesia dikenalkan dengan pemilihan secara langsung, baik pemilihan presiden maupun pemilihan gubernur dan bupati serta walikota dimana pemilihan lebih didominasi oleh suatu fokus pada sejumlah kecil aspek Kriteria pemimpin yang didefinisikan secara luas. Studi tentang kriteria kepemimpinan pada masa ini hanya diukur dengan menggunakan kuesioner, yang berorientasi pada "like and dislike". Dalam mendapatkan pemimpin yang baik dibutuhkan kriteria kepemimpinan yang memenuhi syarat agar mendapatkan pemimpin yang dapat mensejahterakan masyarakat. Apabila masyarakat mendapatkan kesejahteraan dari pemimpin sesuai kriteria kepemimpinan maka salah satu nilai-nilai dasar demokrasi sudah dapat terpenuhi. Apakah masyarakat Indonesia sudah mendapatkan pemimpin sesuai dengan kriteria kepemimpinan dan meningkatnya kualitas idea demokrasi? pertanyaan ini yang akan dikupas secara singkat dalam tulisan ini.

Kata Kunci : *Kriteria Kepemimpinan, Kualitas Demokrasi*

A. PENDAHULUAN

Manusia yang memiliki kekuatan fisik lebih kuat akan muncul menjadi sosok pemimpin dalam kelompoknya, Pola kepemimpinan yang mendasar dan berkembangnya dalam diri semua makhluk hidup. Bahkan pada tumbuh-tumbuhan sekalipun sifat superior, berlaku kompetisi untuk survival terhadap berbagai keadaan alam dan hanya tumbuhan yang kuatlah yang akan tetap hidup. Namun pada hewan dan manusia terdapat faktor penting

lainnya yang menyertai kekuatan fisik dan naluri kepemimpinan.

Dua faktor penting kepemimpinan diatas yaitu kekuatan fisik dan naluri kepemimpinan merupakan suatu syarat bagi seorang pemimpin di masa lampau. Saat ini kedua faktor tersebut tidak lagi menjadi syarat mutlak kepemimpinan. Pandangan terhadap konsep kepemimpinan berkembang pada suatu keefektifan kelompok dalam mencapai tujuannya. Aktivitas manusia pada masa kini tidak lagi terfokus untuk

mempertahankan hidupnya atau usaha–usaha pemenuhan kebutuhan fisiologis dan berkembang pada pemuasan kebutuhan hidup. Artinya diperlukan strategi kepemimpinan yang sesuai dengan pencapaian tujuan kelompok yang pada masa kini yang berorientasi pada pemuasan kebutuhan hidup.

Persoalan kepemimpinan dibicarakan di tengah masyarakat bangsa Indonesia dan terutama mereka yang telah memiliki hak untuk memilih yang sudah bersiap menghadapi pelaksanaan pemilu tahun 2019 pada bulan April tanggal 17. Seringkali terjadi dalam praktik penyelenggaraan negara, pejabat publik dari tingkat pusat hingga di daerah tidak dapat membedakan posisinya sebagai pemimpin yang harus mensejahterakan rakyat dan menjalankan tugas kepemimpinan dengan kedudukannya sebagai pemimpin yang hanya mensejahterakan sebagian kelompok. Perilaku para pemimpin yang dihadirkan melalui pemberitaan media akhir-akhir ini sungguh membuat masyarakat prihatin. Kalau dahulu penjara banyak dihuni oleh pelaku kejahatan dan tindak kriminalitas, maka saat ini penjara banyak dihuni oleh para pemimpin yang koruptor. Beberapa pihak menilai bahwa telah terjadi krisis kepemimpinan di negeri ini.

Konsep kepemimpinan saat ini tidak lagi bersifat sederhana, karena masalah–masalah yang dihadapi manusia pun semakin kompleks. Seorang pemimpin tidak lagi banyak

mengendalikan kekuatan fisik dan naluri kepemimpinan yang merupakan faktor internal bagi seorang pemimpin, tetapi juga kecerdasan pemikiran, perilaku, penguasaan organisasi, penguasaan lingkungan dan banyak lagi faktor yang harus dipenuhi bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin dapat dikatakan efektif apabila kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan pada organisasi yang bersangkutan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi.

Pentingnya kepemimpinan pada hakekatnya disebabkan perubahan–perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kebutuhan yang tidak akan pernah terpuaskan, akan melahirkan usaha–usaha pencapaian pemenuhan kebutuhan hidup. Usaha–usaha tersebut ditandai dengan perkembangan teknologi dan adanya globalisasi, perkembangan inilah yang menciptakan suatu sebutan nama bagi manusia yang memanfaatkannya sebagai manusia modern.

Sehubungan dengan ini, Whyte dalam Kartono (1991) menyebutkan bahwa manusia modern sebagai *organization man*, sebab dia selalu sibuk mengorganisir sesuatu. Sedangkan Siagian (1997) berpendapat bahwa setiap manusia modern pasti terikat dalam ikatan berbagai organisasi, mulai dari organisasi masyarakat seperti RT/RW sampai organisasi tempat bekerja serta berbagai macam organisasi sosial, keagamaan/kepercayaan, keolahragaan dan sebagainya.

Selanjutnya, agar terjadi ketertiban dalam kegiatan organisasi, terutama organisasi formal maka perlu ada pengaturan mengenai pembagian tugas, cara kerja dan hubungan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain, serta pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Oleh sebab itu kegiatan dalam organisasi perlu dikendalikan atau dipimpin oleh seorang pemimpin. Kegiatan pengaturan organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin tidak hanya pengaruh terhadap ketertiban jalannya organisasi saja melainkan juga berpengaruh terhadap tujuan organisasi.

Menurut Kartono (1991), keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan yang ingin diraih bergantung kepada kepemimpinannya, yaitu apakah kepemimpinan tersebut mampu menggerakkan semua sumber daya manusia, sumber daya alam, sarana, dana, serta waktu secara efektif dan efisien serta terpadu dalam proses manajemen.

Peranan pemimpin dalam organisasi sebagai penggerak, pengarah dan pembimbing membuat organisasi selalu membutuhkan kehadirannya. Thoha (1991), mengemukakan bahwa “pemimpinlah yang bertanggungjawab atas kegagalan suatu pekerjaan, merupakan ungkapan yang mendudukkan posisi pemimpin dalam suatu organisasi pada posisi yang penting”. Lebih lanjut dikemukakan oleh Katono (1991), bahwa “masyarakat modern sekarang sangat

mebutuhkan pola kepemimpinan yang baik, yang mampu menuntun organisasi sesuai dengan asas-asas kepada masyarakat luas”.

Manajemen modern baik di dunia bisnis dan industri, juga kepemimpinan di birokrasi pemerintahan serta kepemudaan pada jaman sekarang tidak bisa dipandang sebagai bentuk pemimpin yang murni hierarkhis formal yang objektif. Oleh sebab itu, Kartono (1991) menilai bahwa “kepentingan terhadap kepemimpinan yang baik, dengan ciri-ciri karakteristiknya yang informal, pribadi dan individual, menjadi suatu kebutuhan yang bisa dipahami untuk dipenuhi”.

Kebutuhan terhadap kepemimpinan yang baik juga didukung oleh adanya lingkungan luar yang mempengaruhi organisasi, sehingga organisasi akan senantiasa menghadapi keadaan yang bisa berubah setiap saat, dan hal tersebut merupakan tantangan bagi kepemimpinan organisasi agar mampu menyesuaikan diri sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan bisa tercapai. Dengan demikian, kepemimpinan yang ideal dalam organisasi formal menjadi salah satu unsur terpenting guna tercapainya tujuan organisasi.

Begitulah kehidupan manusia, dia bergerak dari suatu kebutuhan ke kebutuhan yang lain. Tiada henti melahirkan konflik dan kerjasama antar individu atau golongan. Kepentingan dan kebutuhan itu melahirkan nilai-nilai politik berkaitan dengan cara

bagaimana nilai-nilai ini dialokasikan didalam masyarakat.

B. LANDASAN TEORITIS

Siagian dalam Martoyo (1998) mengemukakan sejumlah persyaratan yang pada dasarnya sekaligus suatu kriteria kepemimpinan, sebagai berikut:

1. Pendidikan umum yang luas.
2. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang *generalis* yang mampu mengembangkan *manajerial skill* yang dituntut oleh tugasnya dan tidak perlu menjadi seorang *specialist*.
3. Kemampuan berkembang secara mental.
4. Memiliki rasa ingin tahu, inovatif dan kreatif.
5. Kemampuan menganalisa situasi yang dihadapi secara teliti, matang dan mantap.
6. Memiliki daya ingat yang kuat.
7. Kapabilitas, integratif yaitu kemampuan yang menyangkut berbagai aspek.
8. Keterampilan berkomunikasi.
9. Keterampilan mendidik
10. Rasionalitas dan objektif dalam berpikir dan pengambilan keputusan.
11. Pragmatis yaitu membuat keputusan yang dilaksanakan.
12. *Sense of Urgency* atau adanya rasa sesuatu itu lebih penting daripada yang lain.
13. *Sense of Timing* atau mengetahui saat tetap / tidak tepat untuk bertindak.

14. *Sense of Cohersiveness* artinya merasa satu dengan yang dipimpin, kolega setingkat dan atasannya.

15. *Sense of Relevance* menyangkut keterkaitan keputusan yang diambil dengan tujuan yang hendak dicapai.

16. Kesederhanaan dalam cara hidup cara bekerja, cara bertindak.

17. Keberanian dalam mengambil keputusan.

18. Kemampuan mendengar pendapat / saran orang lain.

19. Adaptif, fleksibel dalam menghadapi perubahan.

20. Ketegasan dalam menghipi bawahan dan ketidaktentuan.

Harold Lasswel dan nilai dasar Demokrasi, dimana Harold Lasswel (1958) menyatakan bahwa: politik adalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana? (*Who gets, what, when and how?*) dia menyatakan bahwa di dalam kehidupan manusia terdapat 8 nilai dasar demokrasi utama yang selalu dipergunakan oleh masyarakat:

1. Kekuasaan (*Power*);
2. Peradaban/pencerahan (*Enlightenment*);
3. Kesejahteraan (*Wealth*);
4. Kesehatan (*Health*);
5. Keterampilan/keahlian (*Skill*);
6. Perhatian (*Afection*);
7. Kebenaran, kepatuhan dan keadilan; dan
8. Penghargaan (*Respect*).

Karl W. Deucht (1974) menambahkan dua nilai yaitu :

1. Keamanan; dan
2. Kebebasan.

Kesepuluh nilai yang dikemukakan oleh Lasswel dan Karl W. Deucht adalah nilai dasar yang diinginkan oleh setiap orang dalam suatu negara agar dipenuhi oleh pemerintah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Persyaratan dan Kriteria Kepemimpinan

Siagian dalam Martoyo (1998) mengemukakan sejumlah persyaratan yang pada dasarnya sekaligus suatu kriteria kepemimpinan sebagai berikut :

- a. Pendidikan umum yang luas.
- b. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang *generalis* yang mampu mengembangkan *manajerial skill* yang dituntut oleh tugasnya dan tidak perlu menjadi seorang *specialist*.
- c. Kemampuan berkembang secara mental.
- d. Memiliki rasa ingin tahu, inovatif dan kreatif.
- e. Kemampuan menganalisa situasi yang dihadapi secara teliti, matang dan mantap.
- f. Memiliki daya ingat yang kuat.
- g. Kapabilitas, integratif yaitu kemampuan yang menyangkut berbagai aspek.
- h. Keterampilan berkomunikasi.
- i. Keterampilan mendidik

j. Rasionalitas dan objektif dalam berpikir dan pengambilan keputusan.

k. Pragmatis, yaitu membuat keputusan yang dilaksanakan.

l. *Sense of Urgency* atau adanya rasa sesuatu itu lebih penting daripada yang lain.

m. *Sense of Timing* atau mengetahui saat tetap / tidak tepat untuk bertindak.

n. *Sense of Cohersiveness* artinya merasa satu dengan yang dipimpin, kolega setingkat dan atasannya.

o. *Sense of Relevance* menyangkut keterkaitan keputusan yang diambil dengan tujuan yang hendak dicapai.

p. Kesederhanaan dalam cara hidup cara bekerja, cara bertindak.

q. Keberanian dalam mengambil keputusan.

r. Kemampuan mendengar pendapat / saran orang lain.

s. Adaptif, fleksibel dalam menghadapi perubahan.

t. Ketegasan dalam menghipi bawahan dan ketidakentuan.

Dari dua puluh kriteria tersebut diatas Hal yang perlu diperhatikan bahwa sangat sulit bagi calon pemimpin untuk memiliki semua kriteria tersebut diatas. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang pemimpin untuk menganalisa diri sendiri untuk melihat kriteria kepemimpinan yang telah dimilikinya dan yang masih perlu dimiliki dan dilengkapi serta dikembangkan melalui pendidikan, baik pendidikan yang bersifat formal maupun yang bersifat informal dan

dimana calon pemimpin tersebut akan ditempatkan.

Jika melihat kriteria kepemimpinan pemerintah sebagai lembaga politik yang terpenting adalah mendapat legitimasi dari masyarakat untuk menampung aspirasi dan memenuhi kepentingan serta kebutuhan masyarakat, maka fungsi utama kepemimpinan adalah mengupayakan semaksimal mungkin terpenuhinya kebutuhan rakyatnya.

Kriteria kepemimpinan dalam suatu organisasi adalah bersifat khas. Artinya kriteria kepemimpinan dituntut untuk dimiliki oleh seorang pemimpin suatu organisasi yang bisa berbeda dengan kriteria kepemimpinan yang dituntut organisasi lain, sehingga kriteria kepemimpinan dalam suatu organisasi belum tentu baik pula bagi negara organisasi lainnya. Selain itu, kriteria kepemimpinan yang baik harus sesuai dengan konteks atau situasi dimana kriteria tersebut akan diterapkan.

Situasi tersebut mencakup kemauan anggota, hubungan anggota, ukuran organisasi, tugas, struktur, norma dan yang lainnya. Selanjutnya, kriteria kepemimpinan yang ideal juga bersifat dinamis. Artinya, kriteria kepemimpinan harus menyesuaikan diri dengan perubahan organisasi dan lingkungan organisasi, sehingga pemimpin diharapkan tidak bersifat kaku dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya. Oleh karena itu penerapan suatu bentuk kepemimpinan pada saat ini, belum tentu efektif untuk

masa yang akan datang, sehingga perlu usaha-usaha kerjasama antara pemimpin dan yang dipimpin untuk selalu mengembangkan sikap kritis demi koreksi kedua belah pihak, agar jalannya organisasi bersifat dinamis.

Terdapat Dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang merupakan kriteria untuk kepemimpinan yaitu :

a. Faktor Internal

Faktor internal, yaitu yang berasal dari dalam diri seorang pemimpin. Faktor ini biasanya bawaan lahir atau bakat, namun faktor ini dapat ditumbuhkan dengan pendidikan, pelatihan dan dukungan lingkungan.

Faktor-faktor dalam faktor internal kepemimpinan, antara lain :

- 1) Kekuatan fisik.
- 2) Kecerdasan pemikiran.
- 3) Kecerdasan emosional.
- 4) Perilaku.
- 5) Pengalaman.
- 6) Keturunan.

b. Faktor Eksternal

Faktor yang berasal dari individu/diri seorang pemimpin. Faktor ini sering disebut faktor lingkungan organisasi. Faktor ini terbagi atas dua kelompok, yaitu :

- 1) Faktor internal dalam organisasi yang terdiri dari empat komponen utama, yaitu:
 - a) Tujuan (*goals*) organisasi.
 - b) Struktural (*Structure*) organisasi.
 - c) Teknologi (*Technology*).

- d) Karakter hubungan dan tugas anggota.
- 2) Faktor lingkungan luar organisasi yang terdiri dari empat bagian, antara lain :
 - a) Keadaan sosial, politik dan hukum.
 - b) Keadaan perekonomian.
 - c) Kebudayaan lingkungan di sekitar organisasi.
 - d) Keberadaan organisasi lain.

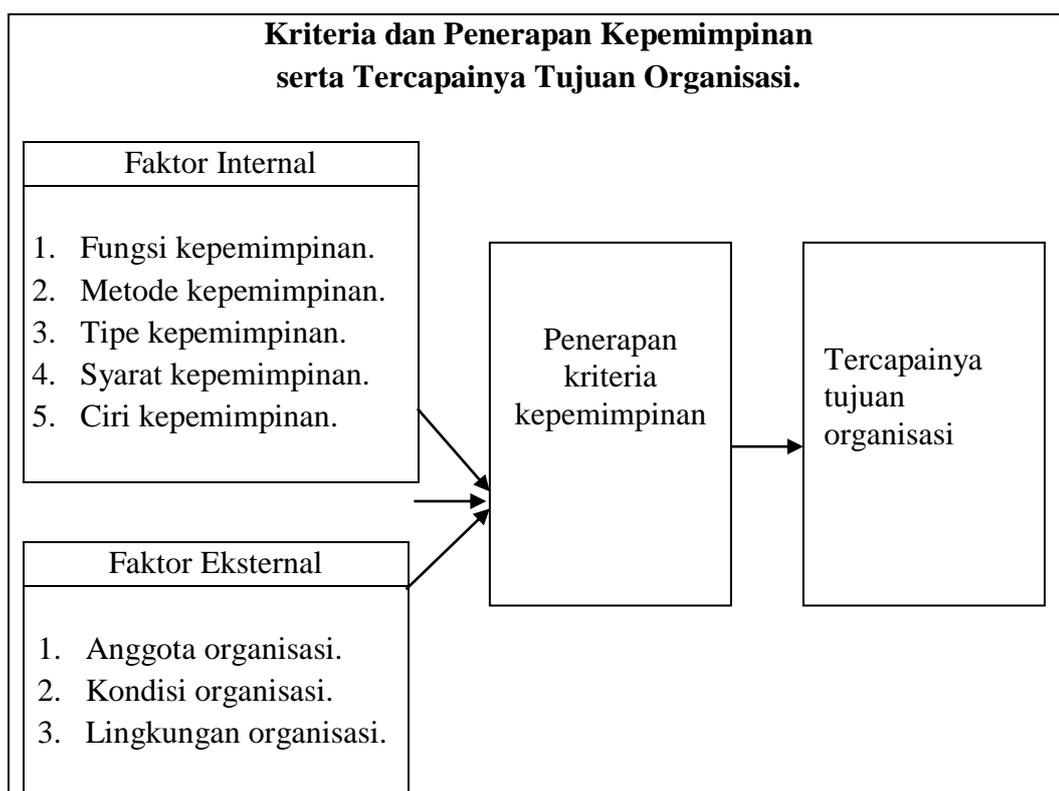
2. Kriteria Kepemimpinan Dalam Organisasi

Adapun konsep umum mengenai kriteria kepemimpinan dalam organisasi, yaitu perilaku kepemimpinan dari seorang pemimpin yang mampu menjalankan organisasi dan aggotanya menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan bersama. Seorang pemimpin dituntut untuk melaksanakan fungsi kepemimpinannya dengan baik, dengan menggunakan metode kepemimpinan yang tepat pula.

Melalui pengenalan tipe yang dimiliki seorang pemimpin dan juga syarat-syarat kepemimpinannya yang perlu dipenuhi dengan pendekatan ciri kepemimpinan yang ideal, maka perilaku kepemimpinan ideal bisa diciptakan

Sedangkan konsep khusus yang ditawarkan mengenai perilaku kepemimpinan efektif organisasi yaitu menyerahkan unsur-unsur yang diperukan dalam menciptakan perilaku kepemimpinan yang efektif tersebut pada organisasi itu sendiri. Hal ini disebabkan karena perilaku kepemimpinan yang efektif lebih bersifat khas, situasional dan dinamis. Seorang pemimpin dalam rangka melaksanakan kepemimpinannya harus selalu mengikuti perubahan – perubahan yang dialami organisasi dan lingkungannya.

Kedua konsep di atas saling mempengaruhi diterapkannya bentuk kepemimpinan efektif dalam suatu organisasi. Konsep umum memberi perhatian kepada faktor internal yang harus dipenuhi oleh individu pemimpin, sedang konsep khusus lebih memberi perhatian pada faktor eksternal yang berasal dari luar individu pemimpin. Hubungan mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penerapan bentuk kepemimpinan efektif dan tercapainya tujuan organisasi dapat digambarkan sebagai berikut :



Kriteria kepemimpinan berkaitan erat dengan fungsi pengendalian organisasi. Sistem pengendalian organisasi menurut Etzioni (1985), bertujuan menjamin agar semua peraturan dan perintah organisasi ditaati dan diikuti. Aspek kepatuhan anggota terhadap organisasi dikendalikan dan dipengaruhi oleh perilaku pemimpinnya. Pemimpin merupakan orang yang berhak mengendalikan organisasi dan berhak menerapkan sistem pengendalian yang terbaik bagi organisasi. Sarana pengendalian yang diterapkan organisasi dibagi dalam kategori analitik yaitu fisik, material dan simbolik.

Sistem pengendalian yang berdasarkan atas penerapan sarana fisik disebut kekuasaan memaksa (*coercive power*).

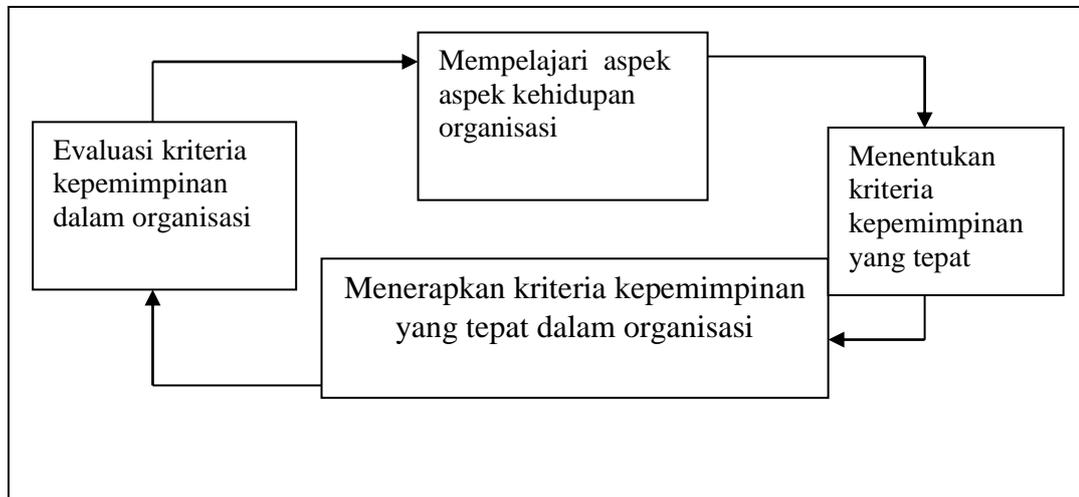
Sedangkan sistem pengendalian dengan menggunakan sarana material (berupa uang, barang atau jasa), mencerminkan kekuatan utiliter (*utilitarian power*), dan terakhir sistem pengendalian dengan menggunakan *symbol normative* seperti prestise dan penghargaan, maupun simbol sosial yaitu cinta kasih dan penerimaan, menunjukkan kekuatan *normative (social power)*.

3. Langkah-Langkah Dalam Menciptakan kriteria Kepemimpinan Organisasi

Kriteria kepemimpinan yang ideal dalam suatu organisasi dapat diperoleh secara langsung (bawaan dari seorang pemimpin) ataupun juga dengan tidak langsung (melalui proses

pembelajaran dan mengikuti pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi). Untuk dapat menciptakan perilaku kepemimpinan yang ideal, maka berikut ini, dijelaskan :

Langkah – langkah menentukan kriteria kepemimpinan dalam organisasi.



Dalam menciptakan kriteria kepemimpinan dilaksanakan dengan beberapa langkah, sebagai berikut:

1. Evaluasi kriteria kepemimpinan dalam organisasi. Langkah ini dilaksanakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pola kepemimpinan sebelumnya. Selain itu dapat juga dipelajari hambatan dan peluang pengembangan kepemimpinan yang akan diterapkan.
2. Mempelajari aspek–aspek kehidupan organisasi. Langkah ini dimaksudkan pada usaha pengenalan dan pemahaman berbagai variable yang terdapat dalam organisasi, sehingga kepemimpinan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan.
3. Menentukan kriteria kepemimpinan yang tepat. Dari kedua langkah diatas dapat ditentukan beberapa alternatif pengambilan pola kepemimpinan yang tepat.
4. Menerapkan kriteria kepemimpinan yang tepat dalam organisasi. Merealisasikan pola kepemimpinan yang dipilih dari beberapa alternatif yang ada.

Langkah–langkah di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terputus. Artinya setiap langkah tersebut akan diikuti langkah–langkah selanjutnya dan terus berputar selama organisasi itu tetap berlangsung. Kepemimpinan dalam organisasi akan bersifat dinamis apabila sejalan dengan organisasi yang terus menghadapi perubahan–perubahan yang disebabkan perkembangan dari masa ke masa. Dengan demikian organisasi selalu membutuhkan pemimpin dengan perilaku kepemimpinan ideal yang bersifat khas, situasional, dan dinamis

agar organisasi dapat bertahan atau mengembangkan dirinya.

4. Harold Lasswel dan Nilai Dasar Kualitas Demokrasi

Harold Lasswel (1958) menyatakan, bahwa: politik adalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana ? (*Who gets, what, when and how?*) dia menyatakan bahwa di dalam kehidupan manusia terdapat 8 nilai dasar demokrasi utama yang selalu dipergunakan oleh masyarakat :

- a. Kekuasaan (*Power*).
- b. Peradaban/pencerahan (*enlightenment*).
- c. Kesejahteraan (*Wealth*).
- d. Kesehatan (*Health*).
- e. Keterampilan/keahlian (*skill*).
- f. Perhatian (*afection*).
- g. Kebenaran, kepatuhan dan keadilan.
- h. Penghargaan (*Respect*).

Karl W.Deucht (1974) menambahkan dua nilai, yaitu :

- a. Keamanan.
- b. Kebebasan.

Kesepuluh nilai yang dikemukakan oleh Lasswel dan Karl W. Deucht adalah nilai dasar yang diinginkan oleh setiap orang dalam suatu negara agar dipenuhi oleh pemerintah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

a. Kekuasaan (*power*)

Demokrasi berkaitan dengan bagaimana alokasi kekuasaan dibuat atau bagaimana kekuasaan terbagi dalam masyarakat. Sebagai nilai kunci dalam politik, bahwa kekuasaan dimaksudkan sebagai kemampuan

seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan diri perilaku dan sebagai partisipasi dalam perumusan kebijakan.

Sistem politik demokrasi yakin bahwa seluruh warga negara semestinya mempunyai hak untuk menikmati kekuasaan dengan jalan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik, misalnya : dalam proses perumusan kebijakan sebagai artikulasi kekuasaan, yang menjadi masalahnya adalah siapa saja dan siapakah warga negara yang secara nyata bisa berpartisipasi dalam kegiatan politik tersebut ?

Untuk mengetahui seberapa jauh kelompok-kelompok masyarakat dapat mempengaruhi perumusan dan implementasi kebijakan. Kita dapat mempelajari sistem politik Indonesia di masa orde baru dan pemilu tahun 1999 serta pemilu tahun 2004. Jika melihat perkembangannya, maka kekuasaan memberikan tempat kepada berbagai kelompok masyarakat untuk dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, dalam hal ini DPR dan DPRD merupakan lembaga yang paling tepat. Masalahnya adalah : bagaimana agar lembaga tersebut dapat berfungsi dan berperan secara wajar di dalam upaya menyuarkan kepentingan masyarakat ? sebab dengan timbulnya berbagai kritik terhadap DPR dan DPRD mengembangkan adanya ketidakpuasan atas peranan lembaga perwakilan tersebut. Tampaknya hingga saat ini hanya kepentingan

aspirasi kepentingan kelompok kecil elite dan mereka yang memiliki akses terhadap penguasa saja yang diperhatikan sedangkan sebagian warga negara terlupakan.

b. Peradaban/Pencerahan
(enlightenment)

Social contract adalah suatu gagasan bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam (*Nature*) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal, artinya berlaku untuk semua waktu serta semua manusia. Hukum ini dinamakan Nature Law. Unsur universalisme ini

yang ditetapkan pada masalah-masalah politik.

Teori kontrak sosial beranggapan bahwa hubungan antara raja dengan rakyat didasari atas suatu kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak. Kontrak ini memberi kekuasaan kepada raja untuk menyelenggarakan ketertiban dan menciptakan suasana yang alami dimana rakyat dapat menikmati hak-hak alamnya (*Natural Right*) dengan aman. Dilain pihak rakyat mentaati pemerintah usaha untuk mendobrak pemerintah yang absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat.

Model Pencerahan (Kontrak Sosial)

	Sarana	Tujuan
Penguasa	Kekuasaan	Stabilitas Ketertiban
Rakyat	Dukungan	Hak-Hak

c. Kesejahteraan (*Wealth*)

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sulit untuk diatasi dan merupakan tugas pokok pemerintah untuk mengadakan program-program yang nyata untuk masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan orang akan semakin lebih bisa bersikap sabar dan arif dalam berhubungan dengan orang dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai contoh bagaimana pemerintah Swedia dan Inggris yang memiliki GNP yang lebih rendah dari

lain. Di bidang politik peningkatan kesejahteraan akan menumbuhkan sikap aparat pemerintah dan masyarakat yang semakin matang dan mandiri.

d. Kesehatan (*Health*)

Nilai ini berkaitan dengan bagaimana kebijakan pemerintah Amerika Serikat ternyata memiliki tingkat kesehatan penduduk yang lebih tinggi karena kedua Negara ini

memiliki program kesehatan sedangkan Amerika Serikat tidak.

Pemerintah Indonesia telah melakukan kebijakan kesehatan antara lain dengan pembangunan Puskesmas dan Posyandu di tiap daerah kecamatan serta program BPJS Kesehatan yang pada akhirnya meskipun arah kebijakan kesehatan sudah tepat akan tetapi jumlah dana untuk program kesehatan ini masih sangat minim sekali dan harus terus di tambah pula.

e. Keterampilan/Keahlian (*skill*)

Masalah keterampilan dapat dikaitkan dengan masalah angkatan kerja yaitu :

- 1) Lapangan kerja masih belum mencukupi.
- 2) Ketidakseimbangan antara pekerja di sektor pertanian dan industri.
- 3) Mutu tenaga kerja.
- 4) Lemahnya posisi tenaga kerja.

Demokrasi memainkan peran yang penting dalam masalah keterampilan masyarakat hingga beberapa tahun yang lampau orang-orang negro di Amerika Serikat masih belum diperbolehkan untuk memasuki lapangan pekerjaan tertentu. Semakin tinggi tingkat keterampilan suatu bangsa semakin maju bangsa tersebut dan sebaliknya.

f. Perhatian (*afection*)

Socrates menyatakan bahwa : perhatian (*afection*) merupakan basis dari semua politik dan diwujudkan dalam bentuk persahabatan dan kesetiakawanan serta persahabatan dan kesetiakawanan tidak dapat dibeli

dengan uang atau melalui paksaan perhatian harus terbentuk secara sukarela dan hanya dapat dicapai dengan komunikasi yang baik, tolong menolong dan saling pengertian dan ini merupakan hasil yang sangat berharga dalam proses politik. Nilai sangat sukar untuk diukur secara kuantitatif karena berkaitan dengan emosi, tetapi dapat dirasakan. Fungsi perhatian sangat penting dalam upaya persatuan bangsa.

g. Kebenaran, kepatuhan dan keadilan.

Nilai saling menghargai sangat berkaitan dengan nilai kebenaran dan nilai moral, nilai kebenaran ini dapat dilihat dalam suasana konflik dimana golongan yang lain merasa benar dan golongan yang lain dianggap salah. Dalam keadaan seperti ini akan terjadi konflik ideologi.

Nilai kebenaran jika dihubungkan dengan keadilan akan terasa sulit. Dimana keadilan diperlukan oleh semua orang untuk menumbuhkan rasa aman dan tenteram. Pemerintah yang adil adalah yang memperlakukan setiap orang secara sama tanpa memandang asal usul kelompok dan penghasilannya. Pada dasarnya semua yang ingin diperlakukan adil tetapi kadang-kadang timbul situasi dimana orang merasa "rugi" jika berlaku adil dan hakim menjatuhkan hukuman yang tidak adil hanya karena ingin memperoleh imbalan materi atau takut kepada kekuasaan yang lebih besar. Dalam jangka panjang ketidakadilan akan menimbulkan perasaan tidak puas dan

tidak percaya terhadap pemerintah dan tentunya akan mempengaruhi instabilitas politik.

h. Penghargaan (*Respect*)

Politik harus berupaya untuk menumbuhkan sikap saling menghargai antar individu, kelompok, suku, agama, ras serta hubungan antar bangsa. Semua harus melibatkan nilai saling menghargai antar satu dengan yang lainnya. Nilai ini dapat digunakan untuk memberikan prioritas terhadap tuntutan masyarakat serta memberikan perhatian terhadap keinginan masyarakat. Secara tidak langsung, nilai ini dapat mempengaruhi kepercayaan seseorang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain, idealnya tercipta saling menghargai. Hal ini dapat tercapai jika dalam masyarakat terdapat rasa aman, keadilan, persamaan serta kesejahteraan yang merata.

Untuk menumbuhkan “penghargaan” kita harus memberikan perhatian pada faktor pendidikan dan sumber daya politik birokrasi pemerintah. Dalam hal pendidikan, kebijakan pendidikan dapat diarahkan untuk menciptakan tekanan perhatian pada keseimbangan antara proses pendidikan dan proses pengajaran yaitu pembentukan dan pembinaan watak serta penguasaan ilmu.

Pendidikan bagi aparat pemerintah ditekankan pada kesadaran mengenai fungsi pelayanan birokrasi agar dalam jangka panjang rakyat dapat mempercayai dan menyukai aparat birokrasi. Birokrasi yang tergantung

hidupnya pada dukungan masyarakat pada umumnya bersikap tanggap dan sebaliknya jika rakyat tidak memiliki posisi tawar menawar, birokrasi cenderung tidak tanggap.

i. Keamanan

Keamanan diperlukan oleh semua nilai-nilai demokrasi dan nilai ini dibutuhkan untuk menjaga pemanfaatan nilai-nilai yang lain. Jika suatu masyarakat sedang menikmati suatu nilai tertentu misalnya kemakmuran mereka ingin terus menerus menikmati kekuasaan kemakmuran tersebut. Untuk itu mereka memerlukan penjagaan yaitu keamanan. Selain itu rasa aman tidak timbul dari adanya gangguan keamanan tetapi juga dari kepastian hukum dan tertib administrasi yang berhubungan dengan pelayanan birokrasi terhadap publik. Jadi keamanan dan rasa aman bagi masyarakat adalah nilai yang penting karena tingkat keamanan yang tinggi menghasilkan perasaan yang tenteram. Keamanan ini merupakan usaha dari politik untuk mencapainya.

j. Kebebasan

Pada masa lampau kebebasan diartikan secara negative yaitu : tiada batasnya. Pada akhir abad ke 19 kebebasan telah diartikan secara positive dimana Karl W. Deutsch memberikan batasan yang positif, sebagai berikut :

- 1) Adanya kesempatan yaitu tidak dilarangnya melakukan kegiatan jika ingin mendapat dan mengambil manfaat dari kebebasan yang tersedia.

- 2) Spontanitas atau keterusterangan yaitu tiadanya kendala untuk menyatakan pendapat secara terus terang tanpa melupakan aspek sopan santun.

Menurut Hegel kebebasan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kapasitas atau kemampuan untuk bertindak yaitu kemampuan yang memiliki prasyarat dan motivasi.
- 2) Tersedianya pilihan yaitu : masyarakat boleh melakukan pilihan dan harus diberi alat agar mampu memilih dan dengan sendirinya kemakmuran serta kesempatan untuk memperoleh informasi dan pendidikan.

Jika melihat kriteria kepemimpinan pemerintah sebagai Presiden, Gubernur maupun Bupati dan Walikota sebagai lembaga politik yang terpenting adalah mendapat legitimasi dari masyarakat dalam pemilihan umum dan terpenuhinya keinginan masyarakat untuk menampung aspirasi dan memenuhi kepentingan serta kebutuhan masyarakat, maka fungsi utama kepemimpinan adalah mengupayakan semaksimal mungkin terpenuhinya kebutuhan masyarakatnya.

Dari Dua Puluh persyaratan yang juga termasuk dalam kriteria tersebut maka yang perlu diperhatikan bahwa tidak ada seorangpun calon pemimpin yang memiliki semua kriteria tersebut diatas. Oleh karena itu, sangat penting

bagi seorang pemimpin untuk menganalisa diri sendiri melihat kriteria kepemimpinan yang telah dimilikinya dan yang masih perlu dimiliki dan dilengkapi serta dikembangkan melalui pendidikan, baik pendidikan yang bersifat formal maupun yang bersifat informal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Kriteria dan kemampuan serta sikap profesional adalah hal yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Namun demikian yang lebih penting adalah bagaimana kepemimpinan dapat memberikan harapan perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakatnya, serta kemajuan bagi negara dan bangsanya. Sebagai pengemban amanah rakyat, pemimpin harus bertanggungjawab terhadap tugas kepemimpinan yang dilaksanakannya. Namun hubungan tersebut semakin melemah dari kualitas idea demokrasi dikembangkan di masyarakat kita yang semakin pragmatis, ditandai dengan rapuhnya integritas kepemimpinan bangsa.
2. Kehidupan politik mempunyai tujuan yaitu tercapainya kebutuhan dasar manusia yang dijabarkan dalam nilai-nilai kualitas demokrasi dan keinginan untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi tersebut harus diupayakan oleh semua masyarakat

Indonesia demi tercapainya kebutuhan dasar masyarakat.

3. Demi tercapainya kebutuhan dasar manusia tersebut memerlukan usaha-usaha yang kuat dan sungguh-sungguh serta terus-menerus dan usaha itu ditujukan pada bagaimana mengisi sistem politik kemas depan yang lebih kompleks dengan permasalahan kebutuhan masyarakat serta dinamika sistem politik adalah untuk mengoreksi pemerintah jika memang perlu diadakan koreksi maka koreksi tersebut untuk penyempurnaan dan bukan untuk merusak tatanan yang sudah ada.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Etzioni, Amitai. 1985. *Organisasi – Organisasi Modern*, terj. Suryatim, Jakarta : UI – Press.
- Goldbreg, Alvin A. dan Carl E. Larson. 1985. *Komunikasi Kelompok : Proses – Proses Diskusi dan Penerapannya*, terj. Koesdarini Soemiati dan Gary R. Jusuf. Jakarta : UI – Press.
- Hasibuan, Melayu, S.P. 1987. *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Haji Masagung.
- Herujito, Yayat M. 1996. *Dasar – Dasar Manajemen*. Bogor: Jurusan Sosek Faperta IPB.
- Kartono, Kartini. 1991. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah*
- Pemimpin Abnormal itu ?*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Martoyo, Susilo. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE.
- Scott, William G., et al. 1992. *Struktur Organisasi dan Dinamikan*. Semarang : Dahana Prize.
- Siagian, Sondang P. 1997. *Filsafat Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Thoha, Miftah. 1991. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : CV. Rajawali
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990 *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.
- Yukl, Gary. 1998. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, terj. Jusuf Udaya. Jakarta : Prenhallindo.
- Harold Lasswel, 1958, *Politic : who, gets, what, when how ?* cleveland, world Publishing Co.
- Karl W.Deuct, 1970 *Politics and Goverment, how people Decide Their Fate*, Boston Houston Miffin Co.

- H. Rosihan Anwar, 1980, *Mengenang Sjahrir*, P.T Gramedia, Jakarta.
- Miriam Budiardjo 1986, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, P.T. Gramedia, Jakarta
- Davis E. After 1988 *Pengantar Analisa Politik*, LP3ES, P.T. Kincir Buana, Jakarta
- Adityawarman, 2009, *Wawasan Tridharma*, nomor XXI, Majalah Ilmiah Kopertis Wilayah IV